

**EVALUASI PROGRAM PENUNTASAN KAWASAN KUMUH BIDANG KEGIATAN
RONA PERFORMANCE PERUMAHAN DI KAMPUNG BUGIS KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2018**

Novia Aryani¹, Kustiawan², Nazaki³
noviaaryani027@gmail.com

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

The purpose of this study is basically to find out the constraints faced in implementing the slum completion program in the field of housing performance in the Bugis village. Bugis village is one of the areas included in the location of residential neighborhoods and slums, to analyze the evaluation of the implementation of the research program using the program evaluation grouping by Wirawan. The method used is descriptive qualitative with informants as many as 14 people by using observation, interview, and documentation techniques. The results of the study conducted by the author found that the constraints that affect the implementation of housing performance hues are budget constraints due to the small ceiling of funds provided for implementation per unit of activity, natural and environmental conditions, the difficulty of finding workers to carry out these activities due to the small amount of wages received per unit of house being worked on, the high risk of work that will occur due to building conditions that do not meet the requirements and irregular.

Keywords: Evaluation, Program, Housing.

I. Pendahuluan

Kehidupan yang menjadi dambaan masyarakat adalah kondisi yang sejahtera. Masalah permukiman kumuh memang sangat terasa sekali di kota-kota besar di Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat padat dengan bertambahnya populasi pertumbuhan yang sangat signifikan setiap tahunnya maka ketersediaan lahan permukiman menjadi sempit apalagi di daerah kota-kota besar. Banyaknya permukiman yang tidak sesuai dengan ketersediaan lahan yang ada dan mengakibatkan lingkungan menjadi kumuh. Salah satu yang menjadi dasar kebutuhan manusia yaitu fasilitas perumahan yang menjadi tempat tinggal dan lingkungan layak huni.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

bertempat tinggal dan menghuni rumah yang layak, terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan program ini adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 02/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh. Berdasarkan Peraturan Menteri ini menegaskan untuk mengatasi semakin bertambahnya pemukiman kumuh di Indonesia. Salah satu langkah pemerintah pusat untuk mewujudkan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2016 yaitu menjadikan kota tanpa pemukiman kumuh di tahun 2019.

Persoalan pemukiman merupakan masalah yang serius karena dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya kantong-kantong kemiskinan yang fatal dan kemudian menyebabkan lahirnya berbagai persoalan sosial diluar kontrol atau kemampuan pemerintah untuk menangani dan mengawasinya. Pemukiman kumuh merupakan salah satu masalah sosial di Indonesia yang tidak mudah untuk diatasi. Beragam upaya dan program telah dilakukan untuk mengatasinya, namun masih saja kita jumpai pemukiman masyarakat kumuh hampir di setiap sudut kota di Indonesia di sertai dengan ketidaktertiban dalam hidup bermasyarakat dalam menata atau mendirikan bangunan seperti pendirian rumah maupun kios dagang secara liar di lahan-lahan pesisir pantai sehingga menimbulkan permasalahan persampahan yang tidak tercover oleh pemerintah kota. Dengan adanya program pengembangan perumahan, kegiatan penuntasan kualitas perumahan Kawasan Pemukiman Kumuh yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang diharapkan dapat mengurangi dampak sosial yang terjadi.

Penanganan pemukiman kumuh dan program penuntasan wilayah kumuh membutuhkan kolaborasi banyak sektor oleh banyak pihak untuk dapat menggerakkan berbagai sumber daya dan dana dari tingkat pusat, provinsi, kota/kabupaten, kecamatan, kelurahan/desa termasuk pihak swasta dan kelompok lainnya. Pemerintah Kabupaten/kota diharapkan mampu menggalang kolaborasi tersebut dalam peningkatan kualitas pemukiman kumuh di wilayahnya. Perlibatan beberapa pihak secara kolaboratif diharapkan memberikan berbagai dampak positif, antara lain meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam pencapaian kota layak huni, meningkatkan rasa memiliki tanggungjawab masyarakat dalam memanfaatkan dan memelihara hasil pembangunan, menjamin keberlanjutan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan swasta terhadap pemerintah.

Sebagai salah satu kesatuan sub-sistem wilayah kabupaten/kota, maka pemerintah kelurahan/desa Bersama Badan Keswadayaan Masyarakat/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM) perlu melakukan hal yang sama secara sinergi dan berkerjasama untuk merumuskan program penuntasan wilayah kumuh.

Kota Tanjungpinang mendapatkan perhatian yang lebih terkait pemukiman kumuh oleh Pemerintah Pusat. Kota Tanjungpinang adalah Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau, yang memiliki luas wilayah darat 14.587,42 Ha dan jumlah penduduk 258,487 Jiwa. Kota Tanjungpinang terdiri dari 4 (Empat) kecamatan yaitu Kecamatan Bukit Bestari, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kecamatan Tanjungpinang Kota dan Kecamatan Tanjungpinang Timur. Dengan jumlah penduduk yang begitu padat, sehingga keberadaan perumahan dan pemukiman yang ada menjadi tidak tertata dengan baik dan kumuh. Program ini dilakukan oleh Pemerintahan Kota Tanjungpinang mulai pertengahan tahun 2016. Guna memfokuskan wilayah sasaran, maka pemerintah melalui walikota mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 377 tahun 2014 Tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Kumuh di Kota Tanjungpinang.

Tabel 1.1 Lokasi Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Kumuh di Kota Tanjungpinang

No	Lokasi	Luas (Ha)	Keterangan
1	Pantai Impian, Kelurahan Kampung Baru	12,6	0°54'027,09" LU 104°26'058,0" BT 0°54'02,7" LU 104°27'011,99" BT
2	Lembah Purnama, Kelurahan Tanjung Ayun Sakti	5,99	0°54'021,26" LU 104°27'011,21" BT 0°54'012,74" LU 104°27'026,47" BT
3	Sungai Nibung Angus, Kelurahan Tanjungpinang Timur	14,6	0°54'043,61" LU 104°27'00,49" BT 0°54'025,59" LU 104°27'026,095" BT
4	Tanjung Unggat, Kelurahan Tanjung Unggat	31,64	0°55'051,02" LU 104°27'040,64" BT 0°55'027,10" LU 104°28'07,27" BT
5	Pelantar Sulawesi, Kelurahan Tanjungpinang Kota	51,85	0°54'027,09" LU 104°26'00,58" BT 0°54'02,7" LU 104°27'011,99" BT
6	Kampung Bugis, Kelurahan Kampung Bugis	18,92	0°56'038,55" LU 104°26'034,15" BT 0°56'012,42" LU 104°26'058,07" BT
7	Senggarang, Kelurahan Senggarang	14,81	0°56'042,53" LU 104°26'09,53" BT 0°56'027,66" LU 104°26'030,50" BT
Total		150,41	

Sumber: SK Walikota Tanjungpinang No. 337 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Kumuh di Kota Tanjungpinang.

Berdasarkan data diatas menjelaskan bahwa pemukiman kumuh banyak terjadi didaerah pesisir atau pelantar. Kawasan kampung bugis merupakan salah satu daerah yang termasuk dalam Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor: 377 Tahun 2014 Tentang penetapan lokasi lingkungan perumahan dan pemukiman kumuh di Kota Tanjungpinang. Tipikal kawasan pemukiman yang termasuk dalam surat keputusan tersebut meliputi area pesisir berupa rumah-rumah yang bersepadan langsung dengan area pantai. Tidak jarang kawasan yang ditemui tersebut dipenuhi oleh sampah baik sampah yang berasal dari masyarakat sekitar maupun sampah kiriman dari luar yang terbawa arus. Kelurahan Kampung Bugis Tanjungpinang dikenal sebagai salah satu kawasan pesisir yang terdeteksi kumuh. Kampung bugis memiliki luas wilayah ± 2.500 Ha yang terdiri dari 6 Rukun Warga (RW) dan 19 Rukun Tangga (RT) serta memiliki jumlah penduduk yaitu 10.437 jiwa dan 3047 KK. (Monografi Kampung Bugis, 2018).

Ditahun 2017 titik utama yang dilakukan pemerintah kota Tanjungpinang dalam pelaksanaan program penuntasan kawasan kumuh berada di kelurahan Kampung Bugis, dengan alasan Pertama berdasarkan indikator-indikator yang paling banyak permasalahan berada di Kelurahan Kampung Bugis. Kedua, menurut kesepakatan bersama antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Satuan Kerja (SATKER) masyarakat sudah menghibahkan tanahnya untuk program tersebut.

Pada tahun 2018 Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Pemukiman (Satker PKP). Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan juga turut andil sebagai fasilitator untuk melaksanakan pelebaran pelantar harapan Kampung Bugis yang merupakan salah satu pelantar penghubung menuju pelantar lingkaran luar yang dilaksanakan Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Pemukiman (Satker PKP), pemaprasan rumah dan melaksanakan pengecatan rumah penduduk dengan harapan dapat merubah wajah kampung bugis menjadi salah satu kawasan tujuan wisata bagi masyarakat Kota Tanjungpinang umumnya dan masyarakat kampung bugis pada khususnya.

Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah Kota Tanjungpinang diketahui bahwa ada tiga (3) program yang menjadi tanggungjawab dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang yaitu Rona *Performance* Perumahan (pengecatan swadaya), Perbaikan Rumah Jalan Pelantar Harapan, dan Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni. Dengan adanya Program Penuntasan Wilayah Kumuh yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang untuk melaksanakan swakelola maka Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Maju Bersama Kampung Bugis menjadi pelaksana swakelola sebagaimana telah dilakukan surat perjanjian kerja. Badan Keswadayaan masyarakat (BKM) Maju Bersama dibantu oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam melaksanakan kegiatan pengecatan tersebut. Pengerjaan Rona *Performance* Perumahan (pengecatan swadaya) dilakukan oleh sepuluh (10) Kelompok Swadaya Masyarakat Kampung Bugis.

Berdasarkan data Kelompok Swadaya Masyarakat Kampung Bugis tersebut berada di bawah pengawasan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Maju Bersama Kampung Bugis yang merupakan pelaksana swakelola dengan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 380 Tahun 2018 Tentang Penerima Bantuan *Performance* Rona Bangunan Kawasan Kumuh Kampung Bugis pada Peningkatan Kualitas Perumahan Kawasan Pemukiman Kumuh Tahun Anggaran 2018. Berikut jumlah rumah yang menerima bantuan *performance* Rona Bangunan Kawasan Kampung Bugis Tahun 2018.

Tabel 1.2 Jumlah Rumah Penerima Bantuan *Performance* Rona Bangunan Kawasan Kampung Bugis Tahun 2018

NO	Wilayah	Jumlah Rumah
1	RT.02/RW.01	24
2	RT.03/RW.01	64
3	RT.01/RW.06	47
4	RT.02/RW.06	33
5	RT.03/RW.06	35
6	RT.04/RW.06	47
Total		250

Sumber: Kelurahan Kampung Bugis, 2018.

Berdasarkan data diatas menjelaskan bahwa jumlah rumah penerima bantuan *performance* rona bangunan yaitu 250 unit rumah tuntas tercatat dari jumlah rumah yang termasuk kedalam kategori kumuh dan tidak layak huni yaitu 270 unit rumah. Jumlah keseluruhan bangunan rumah di wilayah RW 01 dan RW 06 yaitu 620 unit. Jumlah rumah yang belum tercatat yaitu 370 unit Rumah.

II. Metode Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif yang mana berupaya menggambarkan dan menjelaskan, mengungkapkan fakta, keadaan fenomena, variable dan keadaan yang terjadi di lapangan.. Menurut Moleong (2014:11) deskriptif adalah data dalam bentuk kata-kata, gambar, dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah. Sedangkan kualitatif menurut Sugiyono (2011:15) adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar. Kecenderungan untuk menggunakan metode ini penelitian ini karena dianggap sangat relevan dengan materi penulisan skripsi. Sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami kejadian yang diteliti.

Dalam penelitian kualitatif yang dimaksud metode yang biasanya digunakan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dan data skunder dan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan penelusuran data online. Adapun informan pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3.3 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang	1 Orang
2.	Kepala Seksi Penataan Kawasan dan Pertanahan	1 Orang
2.	Kepala Kelurahan Kampung Bugis	1 Orang
3.	Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kampung Bugis Kota Tanjung Pinang	1 Orang
4.	Kelompok Swadaya Masyarakat Rona Performance Perumahan	5 Orang
5.	Masyarakat	5 Orang
	Jumlah	14 Orang

Sumber: Olahan Peneliti, 2019

III. Hasil dan Pembahasan

Penelitian tentang Evaluasi Program Penuntasan Kawasan Kumuh Bidang Kegiatan Rona *Performance* Perumahan Di Kampung Bugis Kota Tanjungpinang Tahun 2018. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu ada beberapa hal yang membedakan dengan penelitian terdahulu, berikut ini merupakan penyajian uraian secara utuh dan sistematis dari beberapa penelitian.

1. Penelitian Skripsi Nopi Sariadi dengan judul Evaluasi Program Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan Dalam Mempromosikan Event Budaya Lokal (Studi pada Event Pertandingan Bintang Jong Race). Hasil penelitian dalam melaksanakan promosi wisata event lokal, Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan mengalami kendala-kendala yang menghambat terlaksananya promosi wisata budaya secara maksimal adapun yang menjadi kendala yaitu: faktor internal yaitu keterbatasan dana yang diberikan Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan, faktor eksternal yaitu tidak ada pendampingan yang diberikan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan hanya memberikan anggaran kegiatan, pemerintah kabupaten bintan melalui dinas pariwisata lebih memprioritaskan event yang berskala internasional daripada event budaya lokal.

2. Penelitian Skripsi Desi Maryanti dengan judul Evaluasi Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2017. Hasil penelitian dalam sudah berjalan dengan baik. Dalam mencapai tujuan dan sasaran program dinas pariwisata dan kebudayaan telah berhasil mencapai target sesuai dengan kerangka acuan kerja mereka. Namun masih kurang maksimal dikarenakan adanya sumber daya manusia yang ada belum bisa mengelola destinasi-destinasi Kota Tanjungpinang dan anggaran dari pemerintah Kota masih terbatas sehingga pelaksanaan program jadi terhambat. Dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas yang telah di bangun oleh pememrintah, serta kurangnya pengawasan dan perhatian dari pemerintah di sekitar objek wisata. Sehingga semua fasilitas yang dibangun dan ditata dengan baik di rusak oleh tangan yang tidak bertanggungjawab.
3. Penelitian Skripsi Regina Sari Bagit dengan judul Evaluasi Program Kerja Dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Pasir Putih Maelang (Suatu Studi Di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Di Kabupaten Bolaang Mongondow). Hasil penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak berjalannya program yang telah dibuat oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow dilihat dari hak kepemilikan yang telah dibuat pembebasan lahan dari pemerintah desa ke pemerintah Daerah, sarana pendukung yang menjadi faktor utama dalam mengelola obyek wisata alam yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow diantaranya penataan ulang pelataran parkir bagi para pengunjung/wisatawan, pembangunan dan perbaikan gazebo, toilet. Berbicara tentang fasilitas pendukung dalam konteks pengelolaan obyek wisata sangatlah penting karena fasilitas pariwisata merupakan inventaris nyata dan menjadikan suatu nilai investasi setiap bulannya mengalami peningkatan selain itu dampak lain terhadap masyarakat dapat meningkatkan penghasilan yang diperoleh setiap minggunya akan meninggkat dari hasil kebun yang mereka jajakan.

Berdasarkan hasil kajian dari penelitian terdahulu yang membedakan penelitian yang diteliti oleh peneliti terhadap penelitian sebelumnya terdapat berbagai aspek perbedaan antara lain Permasalahan yang dibahas masih mencakup pemukiman kumuh yang membedakan penelitian yang diteliti adalah dipenelitian ini membahas Evaluasi Program Penuntasan Kawasan Kumuh bidang kegiatan Rona *Performance* Perumahan, lokasi penelitian yang berbeda, fokus penelitian yang berbeda, teori dan konsep yang digunakan berbeda.

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori oleh Wirawan (2012: 17) Evaluasi Program dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu Evaluasi Proses (*proses evaluation*), Evaluasi Manfaat (*outcome evaluation*), Evaluasi Akibat (*impact evaluation*).

Evaluasi Program Penuntasan Kawasan Kumuh bidang kegiatan Rona Performance Perumahan Kampung Bugis

Kawasan Kampung Bugis merupakan salah satu daerah yang termasuk dalam Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 377 Tahun 2014 Tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Kumuh di Kota Tanjungpinang. Tipikal kawasan pemukiman yang termasuk dalam Surat Keputusan tersebut meliputi area pesisir berupa rumah-rumah yang bersepadan langsung dengan area pantai. Tujuan dari kegiatan penuntasan kualitas Perumahan Kawasan Pemukiman Kumuh adalah merubah wajah kampung bugis yang termasuk delenasi wilayah kumuh menjadi salah satu kawasan tujuan wisata bagi masyarakat kota tanjungpinang dan warga negara asing. Dengan adanya program penuntasan kualitas perumahan kawasan kumuh ini diharapkan dapat menghasilkan proses pelaksanaan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat kota tanjungpinang dan masyarakat kampung bugis.

Rona *Performance* Perumahan adalah kegiatan pengecatan perumahan Bangunan Kawasan Kumuh kampung Bugis untuk mengubah wajah kampung bugis mengingat kampung bugis merupakan salah satu teras kota Tanjungpinang. kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang yang dilaksanakan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat dengan tenaga pelaksana Kelompok Swadaya Masyarakat yang berasal dari masyarakat kampung bugis.

Sumber anggaran yang digunakan pada kegiatan Rona *Performance* Perumahan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2018 dengan pagu anggaran sebesar Rp.900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah). Tujuan kegiatan ini untuk peningkatan kualitas perumahan kawasan pemukiman kumuh. Adapun jumlah rumah yang akan dicat ditetapkan berdasarkan harga borongan dasar penetapan harga analisa pekerjaan pengecatan rumah dengan ukuran 36 m² sumber dana yang tersedia Pagu Anggaran Rona *Performance* Perumahan Kampung 250 rumah sebagai berikut :

Tabel 4.4 Pagu Anggaran Rona *Performance* Perumahan Kampung Bugis

Total Anggaran	Harga satuan	Unit
Rp. 900.000.000,-	Rp 3.600.000	250

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang, 2018

Untuk mengetahui apakah keberhasilan pelaksanaan Program Penuntasan Kawasan Kumuh bidang kegiatan Rona *Performance* Perumahan di Kampung Bugis berjalan dengan baik atau tidak maka peneliti menggunakan teori Wirawan (2012:12) yang mengelompokkan Evaluasi Program menjadi 3 bagian yaitu evaluasi proses (*process evaluation*), evaluasi manfaat (*outcome evaluation*), evaluasi akibat (*impact evaluation*).

Evaluasi Proses (*Process Evaluation*)

Evaluasi Proses (*process evaluation*) yaitu meneliti dan menilai apakah intervensi atau layanan program telah dilaksanakan seperti yang direncanakan, dan apakah target populasi yang direncanakan telah dilayani. Evaluasi proses untuk melihat apakah program yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang dilakukan. Salah satu proses yang dilakukan yaitu dengan perencanaan mengenai program kegiatan yang akan dilaksanakan terlebih dahulu. Evaluasi proses ini dilakukan secara pertemuan antar pihak yang terlibat didalam perencanaan dan perjanjian kerja yang dilakukan. Hal ini harus dilakukan secara terpadu mulai dari perencanaan, keterpaduan program, sumber pendanaan, pelaksanaan pembangunan hingga pemantauan dan evaluasi kinerja. Namun ini juga harus didasari dukungan, komitmen, peran aktif, dan kerjasama yang penuh dari pihak yang terlibat. Namun pada saat pelaksanaan rona *performance* bangunan terjadi kendala anggaran yang tidak sesuai pada rencana anggaran yang sudah ditetapkan. Tidak komitmennya pemerintah daerah dalam kesepakatan MOU (*Memorandum Of Understanding*) merupakan faktor yang paling utama tidak terlaksananya dengan baik program penuntasan kawasan kumuh bidang kegiatan rona *performance* ini. selain itu tidak tuntasnya survey lapangan yang dilakukan oleh dinas sehingga penetapan pengecatan bangunan tidak sesuai dengan kondisi dilapangan.

Evaluasi Manfaat (*Outcomes Evaluation*)

Evaluasi manfaat (*outcome evaluation*) yaitu untuk meneliti, menilai, dan menentukan apakah program telah menghasilkan perubahan yang diharapkan. Dalam kegiatan rona *performance* perumahan ini memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk mengubah wajah kampung bugis mengingat kampung bugis merupakan teras kota Tanjungpinang dan menjadi salah satu kawasan tujuan wisata bagi masyarakat kota tanjungpinang dan warga negara asing.

Program penuntasan kawasan kumuh bidang kegiatan rona *performance* perumahan ini memiliki tujuan untuk keteteraturan bangunan, meningkatkan kesehatan masyarakat dengan

adanya pemukiman yang teratur dan sesuai dengan standar memiliki pengaruh besar untuk kesehatan masyarakat. Dengan adanya program ini memberikan nilai manfaat untuk masyarakat meningkatkan perekonomian masyarakat. Setelah perubahan tampak wajah kampung bugis yang indah dan lebih berwarna banyak masyarakat luar yang berkunjung ke kampung bugis tentunya ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk membuka warung-warung sederhana untuk berdagang dan berjualan makanan maupun minuman.

Evaluasi Akibat (*Impact Evaluation*)

Evaluasi akibat (*impact evaluation*) yaitu dimana melihat perbedaan yang ditimbulkan sebelum dan setelah adanya program tersebut. Evaluasi ini juga melihat apa saja kendala yang dihadapi saat pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan. Dalam pelaksanaan kegiatan Rona *Performance* Perumahan di Kawasan Kumuh Kampung Bugis pastinya mengalami kendala-kendala.

Kegiatan Rona *Performance* ini memberikan dampak yang ditimbulkan. Setelah terlaksananya pengecatan masyarakat dapat merasakan dampak yang terjadi terhadap lingkungan kampung bugis dampak yang ditimbulkan baik dan buruk. Dampak baiknya jika dilihat saat ini kampung bugis sudah dapat dilihat keindahan dari rumah-rumah yang dicat tidak terlihat kumuh dan kusam lagi. Tetapi ada dampak buruk yang menjadi keluhan masyarakat adalah setelah adanya kegiatan pengecatan ini atap rumah masyarakat yang sebelumnya tidak bocor jadi bocor. Permasalahan ini timbul karena kesalahan teknis dalam melakukan pengecatan di atas atap.

Kendala-Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan Program Penuntasan Kawasan Kumuh bidang Kegiatan Rona *Performance* Perumahan Kampung Bugis

Kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program penuntasan kawasan kumuh bidang kegiatan rona *performance* perumahan kampung bugis tahun 2018. Adapun kendala-kendala tersebut:

1. Tidak komitmennya pemerintah daerah kota tanjungpinang dalam pendanaan dan kucuran anggaran yang diberikan untuk kegiatan rona *performance* perumahan. Sehingga menimbulkan kerugian terhadap pihak kedua sebagai pelaksana swakelola.
2. Konsep Perencanaan yang tidak sesuai dengan kondisi dilapangan karena tidak cukupnya waktu survei yang diberikan sehingga ditetapkan secara borongan tipe rumah yang akan dicat.
3. Medan pekerjaan yang sempit karena padatnya dan tidak teraturnya pemukiman di kawasan kampung bugis.

IV. Kesimpulan

Terkait Evaluasi Program Penuntasan Kawasan Kumuh bidang kegiatan Rona *Performance* Perumahan di Kampung Bugis Kota Tanjungpinang Tahun 2018 yang dilakukan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan dengan Badan Keswadayaan Masyarakat dan Kelompok Swadaya Masyarakat.

1. Evaluasi Proses (*Process Evaluation*)

Evaluasi proses tidak berjalan dengan baik penanganan kawasan kumuh perlu dilakukan secara terpadu, mulai dari sinergi perencanaan, keterpaduan program, sumber pendanaan, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi kinerja. Hal ini juga harus didasari dukungan, komitmen, peran aktif, dan kerjasam dari seluruh pihak yang terlibat. Lemahnya perencanaan yang dilakukan tidak secara detail karena survei lapangan yang dilakukan tidak

secara keseluruhan menjadi faktor terpenting terlaksananya kegiatan rona *performance* perumahan ini karena tidak sesuai dengan kondisi lapangan.

2. Evaluasi Manfaat (*Outcomes Evaluation*)

Program Penuntasan Kawasan Kumuh Bidang Kegiatan Rona *Performance* ini sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan kampung bugis sudah jauh lebih baik dari sebelumnya hal ini dapat didukung dengan dokumentasi foto-foto lapangan yang dilakukan saat penelitian. Wajah kampung bugis berubah menjadi destinasi wisata yang dibuktikan dengan banyaknya masyarakat kota tanjungpinang maupun luar daerah yang datang berkunjung kekampung bugis.

3. Evaluasi Akibat (*Impact Evaluation*)

Kegiatan ini dirasakan masyarakat sudah sesuai dengan tujuan dan manfaat dari kegiatan ini kampung bugis sudah jauh lebih baik dari sebelum adanya kegiatan ini dan didukung dengan kegiatan lainnya. Namun evaluasi akibat ini tidak berjalan dengan baik pada pihak kedua pelaksana dari kegiatan rona *performance* perumahan karena merugikan pihak kedua dengan menutupi anggaran yang kurang dan tidak sesuai pengeluaran lapangan.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi yaitu:

1. Faktor internal yaitu keterbatasan anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang kepada Dinas Perumahan rakyat, kawasan Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan kota tanjungpinang dan kecilnya pagu dana yang ditetapkan untuk pelaksanaan per unit kegiatan.
2. Faktor Eksternal yaitu Kondisi alam dan lingkungan seperti adanya curah hujan dan tingkat kepadatan pemukiman, medan pekerjaan sehingga Sulitnya mencari tenaga kerja untuk melaksanakan kegiatan tersebut dikarenakan kecilnya jumlah upah yang diterima untuk per unit rumah yang dikerjakan dan menimbulkan tingginya resiko kerja yang akan terjadi disebabkan kondisi bangunan yang tidak memenuhi syarat dan tidak beraturan.

V. Daftar Pustaka

Buku

- Arikunto, Abdul Jabar. (2010). *Evaluasi Program Pendidikan*;. Pedoman Teoretis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan. Edisi Kedua. Jakarta:PT.BumiAksara.
- Nugroho, D Riant (2003). *Kebijakan Publik; Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Meleong, J Lexy (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif* Edisi Revisi. Rosda : PenerbitPT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Wirawan, (2012), *Evaluasi, Teori, Model, Standar, Aplikasi, Dan Profesi*, Jakarta:Rajawali Pers.

Skripsi

- Nopi sariadi (2019) dengan judul *Evaluasi Program Dinas Pariwisata KabupatenBintan Dalam Mempromosikan Event Budaya Lokal (Studi pada Event Pertandingan Jong Race)*. Skripsi Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Desy Maryanti (2017) dengan judul *Evaluasi Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Dan Kebudayaan Tahun 2017 (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)*. Skripsi Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Regina Sari Bagit (2017) dengan judul *Evaluasi Program Kerja Dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Pasir Putih Maelang (Suatu Studi Di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Di Kabupaten Bolaang Mongondow)*. Skripsi Universitas Sam Ratulangi Kota Manado, Sulawesi Utara.

Dokumen

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh.

Surat Keputusan Wali Kota Tanjungpinang No 337 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Kumuh di Kota Tanjungpinang.

Peraturan Wali Kota Nomor 380 Tahun 2018 tentang Penerima Bantuan Performance Rona Bangunan Kawasan Kumuh Kampung Bugis.

VI. Ucapan Terimakasih

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih dalam penyelesaian penelitian ini, oleh karena itu perkenankan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih yang setulus tulusnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Kustiawan, M. Soc., Sc. Selaku Pembimbing 1 yang telah mendorong, membimbing, serta memberikan arahan yang sangat bermanfaat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Nazaki, S.Sos., M.Si. Selaku Pembimbing 2 dan Pembimbing Akademik yang telah membimbing, memberikan arahan dan dorongan yang berharga bagi penulis dalam perkuliahan maupun penyelesaian skripsi.
3. Bapak Amrialis, Bapak Raja Jamaluddin, Bapak Heriyanto, Bapak Syamsuri, Bapak Zanky, Ibu Lisa, Ibu Rina yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Semoga kebaikan dan keikhlasan dari semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan penelitian ini mendapat balasan dari Allah SWT. Harapan penulis semoga penelitian ini menjadi awal yang baik dalam melangkah bagi penulis dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan ke depannya.